

Antara Islam dan Negara: Review terhadap Kerangka Analisis Bahtiar Effendy tentang Politik Islam Indonesia

Muh. Yahya Agil

Alumni Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah

yahyaagil58@gmail.com

Abstrak Tulisan ini mengkaji secara kritis disertasi Bahtiar Effendy, *Islam and the State: The Transformation of Islamic Political Ideas and Practices in Indonesia*, yang merupakan salah satu karya penting dalam studi mengenai hubungan Islam dan negara di Indonesia. Review ini bertujuan menganalisis kontribusi intelektual, kerangka konseptual, metodologi, serta keterbatasan argumentasi Effendy dalam menjelaskan perubahan politik Islam, khususnya dari pola hubungan antagonistik menuju akomodasi antara Islam dan negara. Kajian dilakukan melalui metode *critical literature review* dengan menjadikan disertasi Effendy sebagai sumber. Hasil review menunjukkan bahwa kekuatan utama karya Effendy terletak pada kemampuannya menjelaskan transformasi politik Islam sebagai proses perubahan pemikiran dan strategi politik, bukan semata-mata sebagai respons terhadap kebijakan negara. Konsep antagonisme dan akomodasi juga memberikan kerangka penting untuk memahami perubahan hubungan Islam dan negara pada masa Orde Baru. Namun, kerangka tersebut memiliki keterbatasan karena cenderung menyederhanakan keragaman aktor dan orientasi politik Islam. Review ini menunjukkan bahwa karya Effendy tetap relevan, tetapi perlu dibaca secara kritis dalam konteks pluralisasi politik Islam dan demokratisasi pasca-1998.

Kata Kunci Bahtiar Effendy; Islam politik; Islam dan negara; transformasi politik; Orde Baru; akomodasi; demokrasi.

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).



Pendahuluan

Relasi antara Islam dan negara merupakan salah satu persoalan paling kompleks dalam sejarah politik Indonesia modern. Kompleksitas tersebut tidak hanya bersumber dari kenyataan bahwa Islam merupakan agama mayoritas penduduk Indonesia, tetapi juga karena Islam sejak masa kolonial telah menjadi sumber identitas sosial, moral, intelektual, sekaligus kekuatan politik. Persoalan menjadi semakin rumit ketika para pemimpin Muslim harus berhadapan dengan pembentukan negara-bangsa modern yang mendasarkan legitimasi politiknya bukan pada identitas keagamaan tertentu, melainkan pada gagasan kebangsaan dan Pancasila. Dengan demikian, pertanyaan mengenai

bagaimana Islam ditempatkan dalam negara Indonesia tidak pernah semata-mata menjadi persoalan teologis. Ia sekaligus merupakan persoalan historis, politik, sosial, dan intelektual yang terus mengalami perubahan.

Dalam konteks tersebut, disertasi Bahtiar Effendy, *Islam and the State: The Transformation of Islamic Political Ideas and Practices in Indonesia*, menempati posisi penting dalam perkembangan studi mengenai Islam politik Indonesia. Disertasi ini dipertahankan di Department of Political Science, Ohio State University, pada 1994 dan kemudian diterbitkan dalam bahasa Indonesia dengan judul *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*. Edisi Indonesia diterbitkan oleh Paramadina pada 1998 dan terdiri atas kajian yang secara sistematis menelusuri perubahan hubungan Islam dan negara, terutama sejak masa awal kemerdekaan hingga periode Orde Baru.

Signifikansi karya Effendy terutama terletak pada upayanya menghindari penjelasan yang melihat hubungan Islam dan negara secara statis dan biner. Dalam banyak perdebatan mengenai Islam politik, hubungan tersebut kerap dipahami melalui oposisi antara negara Islam dan negara sekuler. Effendy justru menunjukkan bahwa pengalaman Indonesia tidak sepenuhnya dapat dijelaskan melalui kedua kategori tersebut. Dalam pembahasannya, hubungan antara Islam dan negara mengalami perubahan dari pola antagonistik menuju pola yang semakin akomodatif. Perubahan tersebut bukan sekadar akibat perubahan kebijakan negara, tetapi berkaitan erat dengan transformasi internal pemikiran dan strategi politik umat Islam. Karena itu, kata “transformasi” dalam karya Effendy memiliki arti penting: yang berubah bukan hanya sikap negara terhadap Islam, tetapi juga cara kelompok Muslim memahami tujuan politik Islam, memformulasikan hubungan agama dan negara, serta menentukan strategi untuk mencapai tujuan politiknya.

Argumen tersebut perlu ditempatkan dalam perkembangan literatur mengenai Islam dan politik Indonesia. Sebelum karya Effendy, studi mengenai politik Islam Indonesia telah menghasilkan sejumlah perspektif penting. Herbert Feith, misalnya, memberikan kerangka analitis mengenai politik Indonesia pascakemerdekaan dengan menempatkan Islam sebagai salah satu kekuatan politik yang berinteraksi dengan nasionalisme, komunisme, birokrasi, dan kelompok-kelompok politik lainnya. Studi mengenai partai-partai Islam kemudian memperlihatkan bagaimana aspirasi politik Islam mengalami ketegangan dengan proyek nasionalisme negara. Dalam perspektif ini, persoalan politik Islam tidak dapat dilepaskan dari kompetisi ideologi dan perebutan legitimasi dalam negara yang baru terbentuk.

Kajian antropologis Clifford Geertz juga memberikan pengaruh besar melalui kategorisasi santri, abangan, dan priyayi dalam membaca struktur sosial-keagamaan masyarakat Jawa. Meskipun kategorisasi tersebut kemudian mendapatkan kritik dan revisi dari berbagai sarjana, karya Geertz membuka ruang bagi pemahaman bahwa ekspresi Islam dalam masyarakat Indonesia tidak bersifat homogen. Perbedaan orientasi sosial dan budaya tersebut berpengaruh terhadap cara umat Islam memandang politik. Dengan demikian, politik Islam tidak dapat dipahami hanya berdasarkan doktrin agama, tetapi harus ditempatkan dalam struktur sosial masyarakat Indonesia yang kompleks.

Perspektif yang berbeda dikembangkan oleh Donald K. Emmerson dan sejumlah sarjana lain yang menyoroti hubungan antara agama, negara, dan politik dalam konteks rezim Orde Baru. Di bawah Soeharto, partai politik Islam mengalami pembatasan, sementara negara berusaha mengendalikan ekspresi politik yang dianggap berpotensi mengancam stabilitas dan ideologi negara. Effendy sendiri menjadikan persoalan tersebut sebagai salah satu titik sentral analisisnya. Menurut ringkasan argumentasi dalam karya tersebut, rezim Soekarno dan Soeharto sama-sama memandang partai politik berbasis Islam sebagai kemungkinan sumber kompetisi terhadap basis nasionalis negara, sehingga politik Islam mengalami proses pembatasan dan “domestikasi”.

Di sinilah kontribusi intelektual Effendy menjadi penting. Ia tidak berhenti pada pertanyaan mengapa negara membatasi politik Islam, tetapi juga bertanya bagaimana umat Islam merespons pembatasan tersebut dan bagaimana respons itu menghasilkan perubahan dalam pemikiran politik Islam. Effendy melihat munculnya apa yang ia sebut sebagai “new Islamic intellectualism” sebagai faktor penting dalam transformasi tersebut. Intelektualisme baru ini tidak lagi sepenuhnya mempertahankan tuntutan politik Islam yang formalistik, tetapi mulai mengembangkan pendekatan yang lebih substantif terhadap nilai-nilai Islam dalam kehidupan politik. Dalam buku yang merupakan pengembangan dari disertasinya, perubahan tersebut dianalisis melalui tiga aspek utama: reformulasi landasan teologis atau filosofis politik Islam, redefinisi tujuan politik Islam, dan penilaian kembali strategi politik Islam.

Literatur yang muncul kemudian memperkuat pentingnya membaca pemikiran Effendy sebagai bagian dari perubahan paradigma studi Islam politik Indonesia. Penelitian tentang pemikiran Effendy, misalnya, menunjukkan bahwa konsep hubungan antagonistik dan akomodatif merupakan salah satu perangkat analitis utama yang digunakan untuk memahami dinamika Islam dan negara pada masa Orde Baru. Sejumlah penelitian juga menilai bahwa perubahan hubungan tersebut tidak dapat dijelaskan hanya melalui kehendak politik Soeharto. Perubahan kelas sosial Muslim, munculnya kelas menengah Muslim, serta berkembangnya pemikiran Islam yang lebih substantif turut menciptakan kondisi sosial bagi hubungan yang lebih akomodatif.

Gagasan tersebut juga memiliki hubungan erat dengan perkembangan pemikiran sejumlah intelektual Muslim Indonesia. Studi Effendy mengenai Munawir Sjadzali, misalnya, memperlihatkan bagaimana munculnya landasan teologis baru bagi politik Islam menjadi bagian dari proses transformasi pemikiran. Effendy menempatkan perubahan tersebut dalam konteks persoalan yang lebih luas, yaitu bagaimana mencari hubungan yang dapat diterima antara Islam dan negara Indonesia. S^{PKP}Studia Islamika Dengan demikian, transformasi politik Islam yang dibahas Effendy tidak hanya berlangsung pada tingkat organisasi atau partai, tetapi juga pada tingkat gagasan dan wacana intelektual.

Literatur mengenai civil society dan demokrasi semakin memperluas konteks tersebut. Effendy sendiri berpendapat bahwa Islam tidak secara inheren bertentangan dengan demokrasi atau civil society. Ia menekankan sifat Islam yang dapat ditafsirkan secara beragam dan menolak asumsi bahwa Islam memiliki satu bentuk sistem politik yang tunggal dan tidak dapat berubah. AAl-Jami'ah Pandangan ini penting karena memperlihatkan bahwa transformasi politik Islam bukan berarti berkurangnya peran

Islam dalam politik. Sebaliknya, politik Islam dapat mengalami perubahan bentuk: dari perjuangan memperoleh simbol dan institusi politik Islam secara formal menuju perjuangan memasukkan nilai-nilai Islam ke dalam praktik politik yang lebih demokratis dan substantif.

Namun, literatur mengenai Effendy juga memperlihatkan adanya kecenderungan untuk membaca karya tersebut terutama sebagai pembelaan terhadap paradigma akomodasi Islam dan negara. Sejumlah penelitian yang secara khusus mengkaji pemikiran Effendy menggunakan pendekatan deskriptif, interpretatif, hermeneutik, atau content analysis untuk menjelaskan konsep hubungan agama dan negara menurut Effendy. Penelitian-penelitian tersebut penting karena menunjukkan luasnya pengaruh pemikiran Effendy, tetapi sekaligus menyisakan ruang bagi review yang lebih kritis terhadap karya awalnya sebagai sebuah disertasi ilmu politik.

Persoalan tersebut menjadi semakin relevan jika disertasi Effendy dibaca dengan memperhatikan konteks waktu ketika penelitian dilakukan. Disertasi tersebut selesai pada 1994, yaitu ketika Orde Baru masih berkuasa dan beberapa tahun sebelum Reformasi 1998. Dengan demikian, tesis mengenai hubungan akomodatif Islam dan negara dalam karya Effendy pada dasarnya merupakan analisis yang dibuat dari dalam konteks politik Orde Baru, bukan analisis retrospektif terhadap keseluruhan perkembangan politik Islam Indonesia hingga era Reformasi. Hal ini membuka pertanyaan metodologis yang penting: sejauh mana konsep antagonisme dan akomodasi mampu menjelaskan perkembangan politik Islam setelah runtuhnya Orde Baru? Apakah transformasi yang ditemukan Effendy benar-benar merupakan perubahan struktural dalam hubungan Islam dan negara, ataukah ia lebih tepat dipahami sebagai perubahan strategi negara terhadap kelompok Muslim tertentu?

Pertanyaan tersebut menjadi semakin penting karena setelah Reformasi terjadi proliferasi partai Islam, organisasi Islam, gerakan sosial-keagamaan, dan kelompok Muslim dengan orientasi politik yang sangat beragam. Effendy sendiri kemudian menulis mengenai munculnya kembali gerakan dan partai Islam setelah jatuhnya Soeharto, termasuk mengenai fenomena militansi Islam pasca-Orde Baru. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa transformasi politik Islam tidak berhenti pada proses akomodasi negara pada akhir Orde Baru. Sebaliknya, demokratisasi membuka ruang baru bagi artikulasi politik Islam yang lebih plural, sekaligus memperlihatkan kembali ketegangan antara Islam, demokrasi, negara, dan identitas politik.

Atas dasar itu, review terhadap disertasi Effendy tidak cukup dilakukan dengan merangkum tesis, bab, dan kesimpulan yang dikemukakannya. Review ini perlu menilai bagaimana Effendy membangun masalah penelitian, memilih unit analisis, menggunakan konsep-konsep politik, membaca perubahan historis, dan menghubungkan transformasi pemikiran dengan perubahan praktik politik. Review juga perlu menempatkan disertasi tersebut dalam percakapan dengan literatur yang lebih luas mengenai Islam politik Indonesia, terutama studi tentang hubungan Islam-negara, nasionalisme, politik Orde Baru, intelektualisme Muslim, civil society, demokrasi, dan perubahan politik pasca-1998.

Dengan demikian, review ini berangkat dari asumsi bahwa karya Effendy merupakan karya yang penting sekaligus terbuka untuk dikritisi. Kekuatan utamanya

terletak pada keberhasilannya menggeser fokus analisis dari pertanyaan normatif mengenai apakah Indonesia seharusnya menjadi negara Islam menuju pertanyaan empiris mengenai bagaimana aktor-aktor Muslim dan negara secara historis menegosiasikan hubungan mereka. Namun, pendekatan tersebut juga perlu diuji terhadap kemungkinan bahwa kategori “Islam” dan “negara” yang digunakan terlalu luas dan berpotensi menyederhanakan keragaman aktor, organisasi, dan kepentingan yang terdapat di dalam masing-masing kategori. Dengan kata lain, pertanyaan penting dalam review ini bukan hanya apakah tesis Effendy benar, melainkan juga bagaimana tesis tersebut dibangun, apa yang berhasil dijelaskan, apa yang kurang dijelaskan, dan sejauh mana kerangka analitisnya masih relevan untuk membaca politik Islam Indonesia.

Metode

Review ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan literature review kritis. Objek primer penelitian adalah disertasi Bahtiar Effendy, *Islam and the State: The Transformation of Islamic Political Ideas and Practices in Indonesia* (Ohio State University, 1994), beserta versi bukunya, *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*. Informasi bibliografis mengenai versi Indonesia menunjukkan bahwa karya tersebut diterbitkan Paramadina pada 1998 dan secara eksplisit merupakan terjemahan/pengembangan dari disertasi doktoral Effendy. Sumber sekunder dipilih berdasarkan tiga kelompok literatur. Pertama, literatur klasik mengenai Islam, negara, dan politik Indonesia yang digunakan untuk mengetahui posisi historis dan teoritis disertasi Effendy. Kedua, karya-karya yang secara langsung membahas pemikiran Effendy, baik artikel ilmiah maupun penelitian akademik, untuk mengidentifikasi bagaimana tesis Effendy telah ditafsirkan oleh peneliti sesudahnya. Ketiga, literatur mengenai perkembangan politik Islam, demokrasi, civil society, dan hubungan Islam-negara setelah Orde Baru yang digunakan untuk menguji keterbatasan dan relevansi tesis Effendy.

Analisis dilakukan melalui empat tahap. Pertama, pembacaan tekstual, yaitu mengidentifikasi pertanyaan penelitian, konsep utama, argumen, struktur pembahasan, dan kesimpulan Effendy. Kedua, analisis kontekstual, yakni menempatkan disertasi dalam konteks politik dan intelektual Indonesia pada masa Orde Baru. Ketiga, analisis komparatif-literatur, yaitu membandingkan argumen Effendy dengan karya-karya sarjana lain mengenai Islam politik Indonesia. Keempat, evaluasi kritis, yang mencakup penilaian terhadap kekuatan argumentasi, konsistensi antara bukti dan kesimpulan, keterbatasan konsep, serta relevansi tesis Effendy bagi perkembangan studi Islam dan politik Indonesia.

Dengan metode tersebut, review ini tidak diarahkan untuk menerima atau menolak tesis Effendy secara sederhana. Tujuannya adalah menunjukkan posisi karya tersebut dalam perkembangan historiografi dan ilmu politik mengenai Islam Indonesia, sekaligus menguji daya jelaskan konsep “transformasi”, “antagonisme”, “akomodasi”, dan “intelektualisme baru” yang menjadi fondasi penting dalam argumentasinya. Pendekatan semacam ini diharapkan menghasilkan review yang bukan hanya bersifat deskriptif, tetapi juga analitis, evaluatif, dan dialogis terhadap literatur, sehingga disertasi Effendy

dapat dipahami sekaligus dikritisi sebagai salah satu karya penting dalam studi politik Islam Indonesia.

Pendahuluan

A. Islam Politik di Indonesia

Hubungan antara Islam dan politik di Indonesia memiliki tradisi yang amat panjang. Akar-akar genealogisnya dapat ditarik ke belakang hingga akhir abad ke-13 dan awal abad ke-14, ketika Islam seperti dikatakan banyak kalangan—pertamakali diperkenalkan dan disebarkan di kepulauan ini. Dalam perjalanan sejarahnya yang kemudian inilah Islam, sambil mengadakan dialog yang bermakna dengan realitas-realitas sosio-kultural dan politik pada tingkat lokal, terlibat dalam politik. Pada kenyataannya malah dapat dikatakan bahwa Islam, sepanjang perkembangannya di Indonesia, telah menjadi bagian integral dari sejarah politik negeri ini meskipun ini tidak serta-merta berarti bahwa Islam secara inheren adalah agama politik, seperti dikatakan sejumlah pengamat.

Terlepas dari kenyataan bahwa hubungan antara Islam dan politik di Indonesia memiliki sejarah yang amat panjang, patut disayangkan bahwa diskursus teoretis mengenainya berkembang baru sepanjang empat dekade belakangan ini saja. Perkembangan yang terlambat ini sekaligus menunjukkan bahwa upaya-upaya teoretis di sekitarnya tidak memuat khazanah teoretis sekaya dan seberagam seperti yang ditemukan di berbagai wilayah Islam lain, misalnya Timur Tengah. Ini terutama benar sehubungan dengan tema-tema umum yang dikembangkan dalam teori-teori yang akan dibahas dalam bab ini. Kenyataan yang menonjol di sini adalah: hampir semua upaya teoretis untuk memahami Islam politik di Indonesia didasarkan kepada kisah mengenai kekalahan/kekalahan politik Islam secara formal.

Butir menonjol lainnya yang mencirikan upaya-upaya teoretis mengenai politik Islam di Indonesia, seperti yang akan tampak lebih jelas pada pembahasan di bawah, adalah bahwa upaya-upaya teoretis itu berkembang menjadi kurang normatif dibandingkan dengan upaya-upaya serupa di jantung wilayah Islam, baik pada periode klasik maupun modern. Untuk alasan-alasan yang sebagian besarnya belum terungkap jelas, teori mengenai Islam politik di Indonesia secara substantif dibangun di atas landasan-landasan empirik di mana perjumpaan politik antara Islam dan politik di kepulauan ini berlangsung.

Disertasi yang ditulis oleh Bahtiar Effendi (1994) ini telah diterbitkan menjadi buku yang berjudul *Islam dan Negara: Transformasi Gagasan dan Praktik Politik Islam di Indonesia* pada tahun 2011. Disertasi ini membahas hubungan politik antara Islam dan negara di Indonesia. Penelitian yang dilakukan Bahtiar Effendi ini dilatarelakangi oleh fenomena yang mengejutkan bahwa sejak berakhirnya kolonialisme Barat pada pertengahan abad ke-20, negara-negara Muslim (misalnya Turki, Mesir, Sudan, Maroko, Pakistan, Malaysia, dan Aljazair) mengalami banyak kesulitan dalam upaya untuk mengembangkan sintesis yang pas antara gerakan-gerakan dan gagasan-gagasan politik Islam dengan negara dalam lokalitasnya masing-masing.

Di negara-negara tersebut, hubungan politik antara Islam dan negara ditandai oleh ketegangan-ketegangan yang tajam, jika bukan permusuhan. Sehubungan dengan posisi Islam yang menonjol di wilayah-wilayah tersebut, yakni karena kedudukannya sebagai agama yang dianut sebagian besar penduduk, ini tentu saja merupakan kenyataan yang menimbulkan tanda tanya. Kenyataan inilah yang telah menarik perhatian sejumlah pengamat Islam politik, dan mereka pun mengajukan pertanyaan: apakah Islam bisa sungguh-sungguh sejalan dengan sistem politik modern, di mana gagasan negara-bangsa merupakan salah satu unsur pokoknya.

Di Indonesia, dalam hal hubungan politiknya dengan negara, sudah lama Islam mengalami jalan buntu. Baik rezim Presiden Soekarno maupun Presiden Soeharto memandang partai-partai politik yang berlandaskan Islam sebagai kekuatan-kekuatan pesaing potensial yang dapat merobohkan landasan negara yang nasionalis. Terutama karena alasan ini, sepanjang lebih dari empat dekade, kedua pemerintahan di atas keras berupaya untuk melemahkan dan “menjinakkan” partai-partai Islam. Akibatnya, tidak saja para pemimpin dan aktivis Islam politik gagal menjadikan Islam sebagai dasar ideologi dan agama negara pada 1945 (menjelang Indonesia merdeka) dan lagi pada akhir 1950-an (dalam perdebatan-perdebatan Majelis Konstituante mengenai masa depan konstitusi Indonesia), tetapi mereka juga mendapatkan diri mereka berkalikali disebut “kelompok minoritas” atau “kelompok luar”. Pendek kata, seperti telah dikemukakan para pengamat lain, Islam politik telah berhasil dikalahkan baik secara konstitusional, fisik, birokratis, lewat pemilihan umum maupun secara simbolik. Yang lebih menyedihkan lagi, Islam politik seringkali menjadi sasaran tembak ketidakpercayaan, dicurigai menentang ideologi negara Pancasila.

Sementara itu, pada sisi lainnya, kaum Muslim yang aktif secara politik juga memandang negara dengan mata curiga. Terlepas dari keinginan negara untuk mengakui dan membantu kaum Muslim dalam mempraktikkan ritual-ritual agama mereka, mereka memandang negara tengah melakukan manuver untuk merontokkan signifikansi politik Islam dan pada saat yang sama mendukung gagasan mengenai sebuah masyarakat politik yang sekular. Situasi ini bahkan seringkali dipandang sebagai indikasi bahwa negara menerapkan kebijakan ganda terhadap Islam. Yakni, sementara mengizinkan dimensi ritual Islam tumbuh berkembang, negara sama sekali tidak memberi ruang atau kesempatan bagi berkembangnya Islam politik. Dalam soal ini, cukuplah dikatakan bahwa saling curiga antara Islam dan negara berlangsung di sebuah negara yang sebagian besar penduduknya beragama Islam.

B. Antagonisme Politik Antara Islam dan Negara

Hubungan politik antara Islam dan negara di Indonesia pada sebagian besar babakan sejarahnya adalah kisah antagonisme dan kecurigaan satu sama lain. Hubungan yang tidak mesra ini terutama, tetapi tidak seluruhnya, disebabkan oleh perbedaan pandangan pada pendiri republik ini yang sebagian besarnya Muslim mengenai hendak dibawa ke manakah negara Indonesia yang baru merdeka. Salah satu butir terpenting dalam perbedaan pendapat di atas itu adalah apakah negara ini bercorak “Islam” atau “nasionalis”. Konstruksi kenegaraan yang pertama mengharuskan agar Islam, karena sifatnya yang holistik dan kenyataan bahwa agama itu dianut oleh sebagian besar

penduduk, harus diakui dan diterima sebagai dasar ideologi negara. Tetapi atas pertimbangan bahwa Indonesia adalah sebuah negara yang secara sosial-keagamaan bersifat heterogen, demi persatuan negara, maka bentuk kenegaraan yang kedua mendesak agar negara ini didasarkan kepada Pancasila, sebuah ideologi yang sudah di-"dekonfessionalisasi".

Kenyataan bahwa diskursus ideologis seperti itu memancing terjadinya konflik sebagian besarnya tidaklah disebabkan oleh tingkat ketaatan religius yang berbeda di kalangan kaum Muslim sebuah pandangan yang melandasi konsep-konsep nasionalis mengenai santri-abangan dan Islam-sekular (atau netral) yang terkenal itu. Tetapi, itu terutama disebabkan oleh ketidakmampuan elite politik nasional dalam menegosiasikan dan mendamaikan perbedaan-perbedaan pandangan tersebut, seakan-akan Islam dan nasionalisme merupakan entitas-entitas yang saling menegasikan satu sama lain.

C. Intelektualisme Islam: Tiga Aliran Pemikiran Baru

Berkembangnya intelektualisme Islam baru di Indonesia selama dua dekade terakhir dapat dianggap berawal dari krisis. Nada umumnya dipengaruhi dan dibentuk oleh situasi yang memperlemah politik Islam dan akibat-akibat tidak menguntungkan yang ditumbulkannya terhadap para pemikir dan aktivisnya. Situasi yang tidak menguntungkan ini muncul terutama, meski tidak seluruhnya, karena hubungan politik yang tidak mesra antara Islam dan negara serta sintesis sosio-kultural dan politik Islam yang diakibatkannya dalam kerangka negara.

Kiprah intelektual tersebut dipelopori oleh sebuah generasi baru para pemikir dan aktivis Islam yang, sejak awal dekade 1970-an, berusaha mengembangkan sebuah format baru politik Islam di mana substansi, bukan bentuk, menjadi orientasi utama. Dalam model yang dikembangkan para intelektual baru tersebut, paham "keislaman" dan "keindonesiaan" dua unsur penting yang memberikan legitimasi kultural dan struktural terhadap pembentukan "negara kesatuan nasional" Indonesia disintesis dan diintegrasikan secara harmonis.

Sebagaimana tampak dalam diskursus intelektual, agenda ini mengharuskan (1) peninjauan kembali landasan teologis atau filosofis politik Islam; (2) pendefinisian kembali cita-cita politik Islam; dan (3) penilaian kembali cara-cara di mana citacita politik tersebut dapat dicapai secara efektif. Inilah bagian utama yang akan dikupas dalam keempat bab berturut-turut mulai bab ini. lebih lanjut menurut Bahtiar Effendi, aktivisme baru ini dapat dikategorikan berkisar pada tiga wilayah penting berikut: (1) pembaruan teologis/religius; (2) reformasi politik/birokrasi; dan (3) transformasi sosial.

D. Politik Islam Dalam Penerapannya

1. Perumusan Kembali Landasan Teologis Islam Politik

Secara singkat bisa dikatakan bahwa inti landasan teologis itu adalah keyakinan akan watak holistik Islam. Premis keagamaan tersebut dipandang sebagai indikasi bahwa Islam menyediakan pengetahuan yang lengkap mengenai semua aspek kehidupan. Bahkan, sudut pandang khusus ini menjadi basis utama pemahaman bahwa Islam tidak mengakui pemisahan antara agama dan negara, antara yang transendental dan yang temporal. Banyak pemimpin dan aktivis Islam politik pada 1950-an dan 1960-an

menggunakan doktrin di atas untuk mengembangkan dan memperluas agenda-agenda sosial dan politik mereka. Termasuk di sini pandangan bahwa Islam telah menyediakan bagi para pemeluknya sebuah konsep negara atau sistem pemerintahan yang lengkap.

Di samping itu, sebagian dari mereka bahkan mendukung pandangan bahwa negara pada hakikatnya merupakan bagian integral, atau perluasan, dari Islam. Inilah sikap religio politis yang, di beberapa bagian dunia Islam, dikenal dengan rumusan *inna al-Islâm al-dîn wa al-dawlah* (Islam adalah agama sekaligus negara). Dari perspektif ini, mereka menegaskan bahwa cukup adil jika mereka mengusulkan agar Islam dijadikan dasar ideologi negara.

Posisi teologis ini, seperti diartikulasikan dalam tema-tema “desakralisasi”, “reaktualisasi” dan “pribumisasi” Islam, mempengaruhi gagasan dan praktik politik para pemikir dan aktivis Muslim yang baru tumbuh dan menulis pandangan-pandangan mereka sejak 1970-an. Ini terutama berkaitan dengan (1) pandangan mereka tentang negara dan ideologinya (Pancasila), (2) aspirasi sosial-politik mereka, dan (3) strategi dan taktik mereka.

Ada dua proposisi religio-politis paradigmatis yang secara langsung dapat diasosiasikan dengan pemikiran teologis mereka. Pertama, sebagai akibat dari kepercayaan bahwa hanya Allah yang memiliki transendensi (sakralitas) mutlak, mereka menganggap semua aspek persoalan duniawi bernilai temporal dan relatif. Akibatnya, pernyataan tersebut berarti bahwa negara, ideologi, partai, atau segala perkara sosial-politik lainnya tidak bersifat sakral atau mutlak. Kedua, berdasarkan watak Islam yang holistik, maka lembagalembaga politik (misalnya negara, partai, dan sebagainya) dan sistem pemerintahannya harus mencerminkan ajaran-ajaran dasar seperti yang digariskan dalam al-Qur’ân dan Sunnah Nabi Muhammad. Tetapi, karena Islam—disebabkan sifat ajaran-ajarannya yang universal dan kekal berbicara tentang masalah-masalah kemasyarakatan (lagi-lagi bukan ritual) dalam bentuk prinsip-prinsip yang sangat umum, maka mereka berpendapat bahwa penerapan prinsip-prinsip umum itu dalam konteks khusus diserahkan kepada para pemeluknya. Dengan kata lain, pertimbangan-pertimbangan atau pilihan-pilihan praktis dalam mewujudkan nilai-nilai khusus di atas diserahkan sepenuhnya kepada para pemikir (*‘ulamâ’*) dan aktivis (*umarâ’*, yang secara harfiah berarti penguasa) Muslim untuk menanganinya.

Penting untuk dicatat bahwa ciri utama pembaruan keagamaan ini adalah kemauan dan kemampuan generasi baru intelektual isme Islam di atas dalam mengkaji secara kritis dan kontekstual ajaranajaran al-Qur’ân dan Sunnah menyangkut posisi Islam *vis-a-vis* negara khususnya dan politik pada umumnya. Upaya intelektual mereka diarahkan kepada penyelidikan doktrinal maupun empiris. Mereka mencoba untuk menelusuri dan menentukan sejauh manakah Islam menggariskan konsep yang eksplisit (atau sekadar seperangkat prinsip umum) tentang negara, politik dan sistem pemerintahan. Di samping itu, akibat persentuhan lama antara Islam dengan masalah-masalah tersebut, baik dalam kerangka pemikiran maupun aksi, mereka juga merevisi pernyataan-pernyataan teoretis para pemikir Islam terkemuka baik yang klasik (misalnya al-Mawardî, Ibn Taymiyah) maupun modern (seperti ‘Alî ‘Abd al-Râziq, Abû al-A‘lâ al-Mawdûdî, Sayyid Quthb) mengenai tema khusus kaitan politik antara Islam dan negara.

Dengan mempertimbangkan nilai-nilai teologis Islam di satu sisi dan konteks sosial-keagamaan dan kultural negara Indonesia di sisi lain, tampak jelas bahwa mereka mendukung paham negara “kesatuan nasional.” Dalam batas-batasnya sendiri, mereka pada dasarnya melihat bahwa bentuk dan struktur negara yang ada dewasa ini adalah model terbaik yang dapat dibayangkan. Karena itu, mereka tanpa ragu-ragu mendukung dan menerimanya. Sebagian dari mereka, seperti Abdurrahman Wahid dan Munawir Syadzali, bahkan kerap kali menyatakan bahwa konstruk ideologis negara yang ada sekarang ini harus dipandang sebagai tujuan final kaum Muslim Indonesia.

2. Mendefinisikan Kembali Cita-cita Sosial-Politik Islam

Meskipun tidak ada kaitan politik yang formal dan legal antara Islam dan negara, mereka sungguh percaya bahwa bentuk negarabangsa Indonesia dewasa ini dengan Pancasila sebagai dasar ideologinya cukup memadai untuk mengakomodasi pengejawantahan ajaran-ajaran sosial-politik Islam. Dengan kata lain, negara setidaknya secara teoretis memberi kesempatan dan peluang bagi penerapan idealisme sosial-politik Islam. Kenyataan bahwa tujuan-tujuan sosial-politik itu yang pada dasarnya berwatak demokratis belum sepenuhnya diterapkan

atau direalisasikan, mungkin dengan beberapa pengecualian selama periode demokrasi liberal pada dekade 1950-an, hal itu harus dianggap sebagai tanggung jawab bersama seluruh warga-negara Indonesia.

Sejalan dengan sudut pandang itu, banyak generasi baru pemikir dan aktivis Muslim berpendapat bahwa masalah khusus tersebut (dan banyak lagi masalah-masalah kenegaraan lainnya yang terkait dengan persoalan itu) seharusnya tidak dipahami sebagai alasan yang sah untuk mengubah corak “kesatuan nasional” negara Indonesia. Sebaliknya, upaya-upaya untuk menegakkan kembali prinsip-prinsip demokrasi itu (atau untuk mengatasi masalah-masalah sosial-politik Indonesia lainnya) harus dilakukan dalam kerangka konstruk ideologi negara yang ada itu.

Bisa dikatakan bahwa pernyataan-pernyataan intelektualisme Islam baru, seperti dipaparkan cukup panjang pada bagian terdahulu, mewakili versi yang lebih luas dari tujuan-tujuan sosial-politik di atas. Terlepas dari perbedaan-perbedaan yang ada di antara mereka, baik dalam hal pendekatan maupun minat, terbukti bahwa pemikiran dan tindakan mereka mengekspresikan kepedulian sosial-politik yang relatif sama. Dalam hal ini, mengingat situasi yang dihadapi oleh para politisi Muslim khususnya dan komunitas Muslim Indonesia umumnya saat ini, tidak salah rasanya jika disimpulkan bahwa upaya-upaya pendefinisian kembali aspirasi-aspirasi sosial-politik Islam yang baru tertuju terutama kepada dua tema pokok: (1) pengembangan tatanan-tatanan politik yang egalitarian dan demokratis; dan (2) penciptaan proses-proses ke arah pemerataan ekonomi. Dilihat dari nestapa Islam politik dan para pendukungnya dalam politik Indonesia kontemporer, kedua tujuan itu tidak hanya relevan, tetapi juga bisa mengobati kondisi mereka yang memiriskan.

Sedikitnya ada dua unsur strategis yang terkandung dalam tujuan-tujuan politik yang baru didefinisikan kembali itu. Pertama, dari perspektif yang berorientasi nilai, gagasan tentang tatanan politik yang egalitarian atau demokratis mencerminkan prinsip-prinsip dasar politik Islam yang harus diterapkan (yaitu *al-‘adl*, *almusâwâh*,

syûrâ). Terlepas dari kenyataan bahwa prinsip-prinsip itu mewakili idealisme politik Islam, namun tujuan politik yang ingin dicapai itu sendiri tidak dipandang sebagai ancaman atau gangguan terhadap konstruk “kesatuan nasional” negara-bangsa Indonesia berbeda dari aspirasi-aspirasi politik Islam sebelumnya, di mana paham negara Islam atau ideologi Islam merupakan butir utamanya.

Pandangan demikian didasarkan kepada kebijakan konvensional (*conventional wisdom*) bahwa tatanan politik yang demokratis berwatak inklusif dan dianut oleh hampir semua perpolitikan modern terlepas dari afiliasi keagamaan mereka. Dalam konteks politik Indonesia, sudut pandang itu dicontohkan oleh kenyataan bahwa pada awal 1950-an, idealisme politik semacam itu pernah menjadi titik temu bagi berkembangnya hubungan politik yang relatif harmonis antara kelompok-kelompok Islam (Masyumi) dan kelompok-kelompok non-Islam (partai-partai Sosialis, Kristen dan Katolik).

Kedua, dari perspektif yang berorientasi tujuan, dengan mengedepankan tujuan sosial-politik semacam ini serta menolak gagasan negara Islam atau ideologi Islam, tokoh-tokoh generasi baru intelektualisme Islam di atas telah mempermudah jalan bagi berlangsungnya integrasi di kalangan arus utama politik nasional, dan karena itu, setidaknya secara teoretis, memperbesar peluang dan kesempatan bagi para partisipannya untuk terlibat sepenuhnya dalam diskursus politik di Indonesia. Dan itu pada akhirnya akan membuat mereka terwakili secara proporsional, baik pada tingkat parlemen maupun eksekutif (birokrasi). Dengan kata lain, dari sudut pandang politik praktis, corak tujuan-tujuan sosial-politik itu, seperti dibayangkan Amien Rais, akan memperlebar kemungkinan bagi para pemimpin aktivis Islam politik dewasa ini untuk punya suara dalam menentukan masa depan Indonesia. Atau, sebagaimana dinyatakan Nurcholish Madjid, tujuan-tujuan sosial-politik itu berpotensi untuk memainkan peran sebagai landasan yang niscaya meskipun jelas bukan satu-satunya bagi ditemukannya keseimbangan politik baru yang di dalamnya mayoritas kelompok agama di negeri ini dapat berpartisipasi sepenuhnya dalam pembangunan nasional.

Kerangka analisis ini juga bermanfaat untuk memahami alasan-alasan di balik penegasan tujuan utama kedua Islam politik, yakni agenda yang berkaitan dengan masalah-masalah pemerataan ekonomi. Di sini diakui, bahwa hubungan politik yang tidak harmonis antara Islam dan negara telah menghilangkan banyak peluang ekonomi kaum Muslim. Seperti dinyatakan Deliar Noer, ini ditandai oleh kegagalan sejumlah sumberdaya penting, dalam pengertian kebijakan dan organisasi, yang dipandang potensial bagi penguatan basis ekonomi kaum Muslim.

E. Problematik Intelektualisme Islam Baru

Seperti sudah ditunjukkan dalam paparan-paparan terdahulu, tujuan utama intelektualisme Islam baru adalah mengembangkan sintesis yang pas antara Islam dan negara. Sementara dapat dikatakan dengan aman bahwa seluruh pendukung intelektualisme Islam baru sama-sama menyepakati tujuan utama di atas, strategi dan taktik yang dikembangkan mereka dalam mencapai tujuan tersebut amat beragam. Pada satu sisi, para pendukung aliran pembaruan teologis/religius dan reformasi politik/birokrasi memberi penekanan perhatian kepada negara, menyuarakan sejenis kerjasama dalam tingkat tertentu dengan negara.

Pada sisi lainnya, para pembela aliran transformasi sosial memfokuskan perhatian mereka kepada penguatan posisi masyarakat, baik secara sosioekonomi maupun politik. Terutama karena perbedaan-perbedaan di atas, maka masing-masing aliran intelektualisme Islam baru tersebut harus berhadapan dengan sumber-sumber dan hambatan-hambatan yang berbeda. Mau tidak mau, kenyataan ini menimbulkan dinamisme internal dalam gerakan ini, yang pada gilirannya memunculkan pertanyaan-pertanyaan sekitar (1) keuntungan komparatif masing-masing kecenderungan intelektual; dan (2) kecocokannya satu sama lain dalam mencapai tujuan pokok bersama. Dalam hal ini, Bahtiar Effendi memberikan tiga problematik dalam Intelektualisme Islam Baru yaitu: 1) Pembaruan Teologis/Religius: Dukungan Negara dan Kecurigaan Masyarakat; 2) Reformasi Politik/Birokrasi: Memudarnya Kecurigaan dan Penarikan Diri Masyarakat; 3) Transformasi Sosial: Hambatan-hambatan Struktural.

Kesimpulan

Sekadar menyimpulkan pembahasan ini, dapat dikatakan bahwa ada beberapa catatan penting yang perlu diangkat sehubungan dengan berbagai perubahan ini. Pertama, kenyataan bahwa idealisme dan aktivisme Islam politik telah berubah dari formalisme-legal ke substansialisme, dan bahwa negara telah memberi tanggapan positif atasnya, tidak sepenuhnya berhasil mengatasi masalah hubungan politik antara Islam dan negara. Dengan kata lain, terlepas dari tanda-tanda yang menggembirakan, perkembangan itu tidak menunjukkan model yang jelas mengenai bagaimanakah Islam (dan agama-agama lain seperti Katolik, Protestan, Hindu dan Budha) dan negara Indonesia seharusnya menjalin hubungan yang saling menguntungkan satu sama lain.

Kedua, transformasi intelektual gagasan dan praktik politik Islam berlangsung dalam situasi otoritarianisme dan penyingkiran politik terhadap banyak kelompok. Karena itu, muncul spekulasi apakah idealisme dan aktivisme yang diperbarui itu masih tetap kokoh jika rezim membiarkan kotak Pandora terbuka, dalam rangka menjalankan sistem pemerintahan yang lebih inklusif dan partisipatoris. Dalam negara semacam itu, di mana kebebasan menyatakan pendapat dijamin, tampaknya intelektualisme Islam baru akan ditandingi oleh aliran-aliran pemikiran lain yang lebih cenderung mempertahankan gagasan dan praktik politik Islam versi yang lebih awal.

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan permusuhan antara Islam dan negara, tampaknya konsolidasi proses ini akan sangat tergantung kepada (1) keterwakilan kaum Muslim secara proporsional dalam lembaga-lembaga politik negara, dan (2) dibelanya komitmen nasional bahwa Indonesia bukanlah negara sekular. Ini mengharuskan dipertimbangkan dan diakuinya nilai-nilai keagamaan dalam proses pembuatan kebijakan.

Dalam konteks ini, cukup dikatakan bahwa konsepsi Islam politik yang formalistik atau legalistik hanya mungkin muncul kembali jika rasa ketertindasan secara sosial, ekonomi dan politik juga makin tumbuh. Sebagaimana dalam pengalaman-pengalaman yang telah lalu, para pemikir dan aktivisnya akan mencari penyelamatan ke dalam, dalam corak Islam yang holistik dan totalistik, untuk menentang negara yang makin pongah.

Referensi

- Azra, A. (2004). *The origins of Islamic reformism in Southeast Asia: Networks of Malay-Indonesian and Middle Eastern 'ulama in the seventeenth and eighteenth centuries*. University of Hawai'i Press.
- Boland, B. J. (1982). *The struggle of Islam in modern Indonesia*. Martinus Nijhoff. SSpringer+1
- Crouch, H. (1978). *The army and politics in Indonesia*. Cornell University Press.
- Effendy, B. (1994). *Islam and the state: The transformation of Islamic political ideas and practices in Indonesia* [Doctoral dissertation, The Ohio State University].
- Effendy, B. (1995). Islam and the state in Indonesia: Munawir Sjadzali and the development of a new theological underpinning of political Islam. *Studia Islamika*, 2(2), 97–121.
- Effendy, B. (1998). *Islam dan negara: Transformasi pemikiran dan praktik politik Islam di Indonesia*. Paramadina.
- Effendy, B. (2003). *Islam and the state in Indonesia*. Institute of Southeast Asian Studies.
- Fealy, G., & White, S. (Eds.). (2008). *Expressing Islam: Religious life and politics in Indonesia*. Institute of Southeast Asian Studies.
- Feith, H. (1962). *The decline of constitutional democracy in Indonesia*. Cornell University Press.
- Feith, H., & Castles, L. (Eds.). (1970). *Indonesian political thinking 1945–1965*. Cornell University Press.
- Geertz, C. (1960). *The religion of Java*. Free Press.
- Hasan, N. (2006). *Laskar Jihad: Islam, militancy, and the quest for identity in post-New Order Indonesia*. Cornell Southeast Asia Program.
- Hefner, R. W. (2000). *Civil Islam: Muslims and democratization in Indonesia*. Princeton University Press. JJSTOR+1
- Hefner, R. W. (2009). *Making modern Muslims: The politics of Islamic education in Southeast Asia*. University of Hawai'i Press.
- Hefner, R. W. (2025). The social scientific study of Islam in Indonesia: A 75 year retrospective. *Studia Islamika*, 32(1), 9–42.
<https://doi.org/10.36712/sdi.v32i1.45289> S^{PKP}Studia Islamika
- Liddle, R. W. (1996). *Leadership and culture in Indonesian politics*. Allen & Unwin.
- Madjid, N. (1992). *Islam, doktrin dan peradaban: Sebuah telaah kritis tentang masalah keimanan, kemanusiaan, dan kemodernan*. Paramadina.
- Sjadzali, M. (1993). *Islam dan tata negara: Ajaran, sejarah dan pemikiran*. Universitas Indonesia Press.
- van Bruinessen, M. (2002). Genealogies of Islamic radicalism in post-Suharto Indonesia. *South East Asia Research*, 10(2), 117–154.
- van Bruinessen, M. (Ed.). (2013). *Contemporary developments in Indonesian Islam: Explaining the "conservative turn"*. Institute of Southeast Asian Studies.